

PERAN GENDER PEREMPUAN ENTREPRENEUR: STUDI KASUS PADA KELUARGA DI BALI

Tettie Setiyarti¹, Ida Ayu Trisna Wijyanthi²

^{1,2}Program Studi S1 Manajemen STIMI Handayani

Email: tettie.setiyarti84@gmail.com¹

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat distribusi kekuasaan dalam keluarga Bali. Penelitian ini mengadopsi desain penelitian studi multikasus yang bersifat eksploratif. Subjek penelitian ini terdiri dari empat pasangan suami istri yang berprofesi sebagai entrepreneur yaitu pendiri dan pemilik bisnis. Mereka merupakan 'Orang Bali', yang lahir dan dibesarkan dengan budaya Bali. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara semiterstruktur dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, meskipun suami dan istri sama-sama terlibat dalam pengurusan bisnis keluarga nyatanya pihak perempuanlah yang dominan menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga dan detail operasional bisnis sehari-hari. Pengambilan keputusan menyangkut permasalahan keluarga atau bisnis terlihat dominasi suami sangat besar. Begitupula pada pengelolaan keuangan dan kepemilikan aset-aset ekonomi sebagian besar dicatatkan atas nama suami. Dari temuan tersebut jelas bahwa distribusi kekuasaan dalam keluarga masih didominasi oleh pihak suami sehingga perempuan Bali yang berprofesi sebagai entrepreneur memiliki tugas dan tantangan yang lebih besar daripada ketika mereka hanya menjadi ibu rumah tangga.

Kata kunci: gender, manajemen rumah tangga, entrepreneur, pembagian peran, distribusi kekuasaan

ABSTRACT

The purpose of this study is to see the distribution of power in Balinese families. This study adopts an explorative multicase studies. The subject of this study consisted of four married women entrepreneurs, namely founders and business owners. They are 'Balinese', who were born and raised with Balinese culture. Data were collected using semistructured interview techniques and analyzed using descriptive analysis. The results showed that even though husband and wife were both involved in managing the family business, in fact the women were dominant in completing household tasks and details of daily business operations. Decision-making regarding family or business problems shows that the husband's dominance is very large. Likewise, financial management and ownership of economic assets are mostly listed in the name of the husband. From these findings it is clear that the distribution of power in the family is still dominated by the husband, thus Balinese women who work as entrepreneurs have greater duties and challenges than when they are just housewives.

Keywords: gender, household management, entrepreneur, role sharing, distribution of power

1. Pendahuluan

Layaknya wilayah lain di Indonesia, Bali dengan kekentalan budaya patriarkinya juga memendam cerita tersendiri mengenai peran perempuan. Berdasarkan angka proyeksi penduduk tahun 2016 tercatat jumlah penduduk di Bali sebanyak 4.200,1 ribu jiwa yang terdiri dari 2.115.000 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 2.085.100 ribu jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk tahun 2016 ini naik 1,14% dari sebelumnya 4.152.800 jiwa. (Pemerintah Provinsi Bali, 2016). Hal ini menunjukkan kalau 49,64% dari total penduduk atau hampir setengah dari penduduk Bali adalah perempuan. Artinya disini, seharusnya perempuan Bali menyimpan potensi yang cukup besar guna menunjang pembangunan daerah. Namun apa daya karena kenyataan berbicara lain, alih-alih menjadi potensi perempuan Bali malah cenderung terpinggirkan.

Bila benar adanya bahwa sekitar 60% dari hampir 54 juta pengusaha UMKM adalah perempuan, maka jika melihat realita yang berkembang mungkin kontribusi perempuan Bali dalam menyokong angka tersebut dapat dikatakan sangat kecil. Bagaimana tidak, angka melek huruf penduduk perempuan di Bali pada tahun 2015 berada pada kisaran 88.94%, amat jauh jika dibandingkan penduduk laki-laki yang berada pada kisaran 96.57%.

Kemudian dari total angkatan kerja yang bekerja di propinsi Bali, yaitu sebanyak 2.372.015 jiwa, hanya 9.45% yang memiliki ijazah D4/S1/S2/S3. Dari persentase tersebut, 59.06% didominasi oleh laki-laki, dan sisanya yang 40.94% dimiliki oleh perempuan. Demikian halnya dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), cuma 67.24% perempuan Bali yang dapat dikatakan bekerja. Mirisnya lagi, 24.55% dari TPAK perempuan di Bali tergolong ke dalam pekerja tak dibayar (unpaid worker) (BPS, 2006; 65). Namun dilain pihak, persentase perempuan yang bekerja sendiri menjadi seorang *entrepreneur* secara mandiri (*self employed entrepreneur*) pada sektor informal lebih besar ketimbang lawan jenisnya, yaitu 7.25% berbanding 6.30% dari total angkatan kerja yang bekerja, atau hampir 16.25% dari TPAK perempuan di Bali. Sebuah nilai yang justru berbanding terbalik dengan nilai persentase perempuan sebagai *self employed entrepreneur* pada sektor formal, yang hanya 6.89% dari total angkatan kerja yang bekerja, hampir setengah dari nilai persentase yang dimiliki lawan jenisnya yang berada pada kisaran 12.99%. Apakah ini menandakan bahwa perempuan entrepreneur Bali memilih menjadi entrepreneur sebagai sambilan saja, karena pekerjaan utamanya masih sebagai ibu rumah tangga?

Memang, masyarakat Bali yang senyatanya masih kuat terselimuti oleh budaya patriarki, senantiasa menempatkan posisi perempuan dibawah laki-laki. Umumnya untuk masyarakat Bali, kemuliaan keluarga akan tercapai hanya lewat seorang atau beberapa orang putra. Demikianlah tuntutan budaya *Purusa*, laki-laki adalah penjaga kesinambungan sebuah trah yang secara moral dibebankan upacara *Pitra Yadnya* (upacara kurban suci yang ditujukan untuk orang tua dan leluhur).

Memakai kalimat lain, orang Bali percaya hanya seorang anak laki-laki yang dapat menyelamatkan kedua orang tuanya dari kekejaman neraka. Sementara bagi perempuan Bali, sejak masih remaja, mereka dikondisikan dan diakomodasikan dalam konsep *Yadnya Sesa* (segala upacara persembahan) secara terus menerus, tanpa batasan yang jelas antara adat dan agama. Ideologi semacam ini sudah pasti berimplikasi buruk bagi peran sosial perempuan di Bali.

Situasi di atas tentunya didukung oleh beberapa terminologi sosial yang justru mempertegas status subordinasi perempuan Bali di bawah kaum laki-laki. Misalkan saja, istilah *Pengayah* (pelayan) yang biasa diberikan oleh pihak sang suami kepada perempuan yang akan atau sudah menikah. Ada juga istilah *Tetekan* (pendatang tanpa sumber daya), yang lazimnya diberikan kepada perempuan yang tinggal di rumah milik keluarga sang suami.

Kemudian, realita pernikahan antar kasta kerap pula memperkeruh suasana, karena dampaknya sangat merugikan kaum perempuan. Bahkan, saking kuatnya

pengukuhan peran sosial perempuan Bali, mungkin tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dunia perempuan di Bali senantiasa dikurung oleh beragam konsep *Purusa*, yang pada akhirnya memaksa mereka menjadi sosok-sosok tanpa daya dan tanpa martabat.

Melihat keseluruhan realita yang terjadi, maka penelitian mengenai *entrepreneurship* dan perempuan di Bali tentunya akan menjadi topik yang sangat menarik untuk diteliti. Terlebih lagi, langkanya tulisan mengenai relasi *entrepreneurship* berbasis gender serta kaitannya terhadap budaya di Bali, pastilah membuat penelitian semacam ini sebagai sebuah keharusan.

Oleh sebab itu, penelitian ini memfokuskan diri bagaimana relasi antara suami dan istri dalam kehidupan sehari-hari mereka. Peneliti berkeyakinan, dengan melihat hal tersebut nantinya mampu mengungkap secara objektif derajat dominasi dan subordinasi antara laki-laki dan perempuan di Bali. Sehingga, secara umum pelaksanaan seluruh penelitian dimaksudkan untuk menjawab bagaimana distribusi kekuasaan dalam keluarga Bali terkait aspek sosial, budaya, dan agama yang dianut oleh keluarga, dengan istri bekerja sebagai *entrepreneur*.

2. Metode

Tindakan sosial dapat berubah karena dalam kehidupan nyata ketidaksinambungan kerap terjadi (Denzin & Lincoln, 2005, hal. 22), dan oleh sebab itu, kajian-kajian yang bersifat positivistik tidak akan dapat menyediakan kerangka investigasi yang tepat, karena "[i]n the empirical world, man is subjective, not objective, except when he is likened to one [an object] by himself or by another subject" (Matza, 1969, hal. 8). Penelitian sosial yang mengedepankan manusia sebagai subjek mestilah mengadopsi pandangan-pandangan yang subjektif pula, dan sudah sewajarnya penelitian tersebut menggabungkan berbagai metode ilmiah dengan berbagai karakteristik unik yang dimiliki oleh tiap-tiap individu yang akan dipelajari, seperti pengalaman, intuisi, dan empati.

Oleh sebab itu, penelitian ini berpijak pada interpretivisme sebagai paradigm utama, yang didirikan di atas ontologi konstruksionis dan epistemologi interpretivis. Schwandt (1994, hal. 118) menjelaskan bahwa konstruksionisme dan interpretivisme. sebagai dua konsep yang saling melengkapi, yang nantinya akan mengarahkan si peneliti dalam memahami realita yang terjadi di tengah masyarakat. Kemudian, karena peneliti berkeyakinan bahwasanya mempelajari masyarakat di dalam komunitas mereka sendiri akan menghasilkan hasil yang lebih baik, maka penelitian ini juga menggabungkan interpretivisme dengan salah satu metode penyelidikan yang kerap digunakan oleh para cendekia naturalis, yaitu etnografi.

Dalam penelitian ini, jumlah kasus (keluarga) dan sub-kasus (entrepreneur perempuan perorangan) yang diteliti telah ditentukan sebelumnya. Penelitian dilakukan di Bali. Peserta penelitian (responden kunci) penelitian ini adalah entrepreneur perempuan (pendiri dan pemilik bisnis) di tingkat Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Mereka merupakan penduduk asli atau dalam penelitian ini disebut sebagai 'Orang Bali', yang lahir dan dibesarkan dengan budaya Bali.

Ukuran sampel di dalam penelitian ini juga dipertahankan sekecil mungkin, dengan menggunakan teknik non-probabilitas sebagai metode utama perekrutan peserta. Terdapat sekitar 25 peserta penelitian berusia 18 tahun ke atas, di mana mereka dipilih secara purposif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan: a) 4 entrepreneur perempuan yang usahanya bergerak di sektor budaya dan agama sebagai peserta utama (responden kunci); b) 26 peserta pendukung, seperti: keluarga dan kerabat keempat entrepreneur perempuan.

Unit analisis dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam tingkat mikro dan makro. Strategi ini, menurut peneliti, sejalan dengan teori praktik kepunyaan Bourdieu (1977) dan juga mempermudah proses analisis dengan menempatkan penekanan yang berimbang antara habitus dan bidang sosial. Unit analisis di

tingkat mikro (tingkat habitus) terdiri dari keempat entrepreneur perempuan (peserta penelitian utama) yang dianggap sebagai sub-kasus. Kehidupan sehari-hari para entrepreneur tersebut, latar belakang keluarga mereka, riwayat pendidikan dan pekerjaan, mitra bisnis maupun pesaing, serta entitas bisnis dianalisis secara menyeluruh. Sedangkan unit analisis pada tingkat makro (tingkat lapangan) terdiri dari komunitas (masyarakat) tempat keempat entrepreneur perempuan hidup, masing-masing sebagai lembaga kolektif integral yang dianggap sebagai kasus. Analisis pada tahapan ini diproyeksikan pada struktur sosial budaya dan konteks yang terkait dengan aktivitas kewirausahaan.

Sedangkan proses analisis penelitian ini dibagi ke dalam dua tahap, yaitu dalam kasus dan analisis lintas kasus. Setiap fase terdiri dari beberapa penekanan, terutama analisis isi (content analysis untuk dokumen), percakapan (conversation analysis untuk wawancara dan observasi), analisis tematik (thematic analysis untuk proses reduksi data), dan analisis matriks (matrix analysis untuk proses tampilan data). Semua penekanan ini digunakan secara kronologis atau simultan untuk meyakinkan peneliti akan kesinambungan logika antar data.

3. Hasil dan Pembahasan

Berbicara mengenai distribusi kekuasaan dalam sebuah keluarga merupakan sebuah hal yang tidak mudah untuk dilihat secara kasat mata. Dari hasil wawancara dan pengamatan di lapangan dalam penelitian ini ditemukan tiga indikator yang dapat digunakan untuk melihat pola distribusi kekuasaan dalam keluarga perempuan pengusaha di Bali. Adapun tiga topik tersebut adalah pembagian peran, pengelolaan atau kepemilikan aset-aset ekonomi, dan pengambilan keputusan. Berikut pembahasan dari masing-masing indikator tersebut.

Dari hasil wawancara baik dengan responden kunci atau responden pendukung nampak bahwa pembagian peran dalam keluarga informan masih timpang. Ketimpangan tersebut terlihat tidak hanya pada ranah domestik tapi juga pada ranah publik. Meskipun telah masuk keranah publik dengan terlibat langsung dalam kegiatan menghasilkan pendapatan bersama-sama suami dengan mengelola usaha yang mereka miliki, ternyata perempuan masih bertanggungjawab secara penuh terhadap kegiatan domestik, yaitu dari penyelesaian tugas kerumahtanggaan hingga pengasuhan dan perawatan anak-anak. Kalaupun ada diantara mereka yang dibantu orang lain, misalkan dengan mempekerjakan asisten rumah tangga, tetapi jelas terlihat bagaimana hari-hari mereka tersita oleh pekerjaan urusan rumah tangga tanpa keterlibatan suami didalamnya.

Ketimpangan pembagian peran tersebut juga meluas keranah Publik yaitu saat mengelola usaha yang dimiliki. Dari data dilapangan diketahui bahwa istrilah yang berperan sebagai motor penggerak dalam mengurus segala hal yang berhubungan dengan operasional usaha. Mulai dari mengurus karyawan, mengelola keuangan usaha serta dalam setiap aktivitas usaha baik dalam pembelian bahan baku, proses produksi hingga tahap pemasaran produk. Bahkan salah satu informan menegaskan bahwa suami terima beres terhadap semua urusan menyangkut kegiatan usaha yang mereka jalankan. Seperti dalam petikan wawancara dengan responden YS berikut ini:

".... Kalau ajiknya tau beres. Awal usaha dulu juga nggak mau bantu-bantu tapi setelah lihat sendiri kalau (usahanya) maju saya sama karyawan repot bungkus pesanan baru mau bantu-bantu.

Tapi ya tetap sampai sekarang saya yang menyelesaikan semuanya, ajik kan jadi bos komisaris jadi ya tau beres saja.”

Tidak berhenti disana, setelah melakukan kewajiban domestik dan publik tersebut perempuan juga masih harus melakukan perannya sebagai anggota masyarakat. Terlebih karena dalam masyarakat Bali baik suami atau istri memiliki porsi sendiri-sendiri dalam melaksanakan peran adatnya. Bagi orang Bali mebanjar atau melakukan kegiatan adat adalah sebuah keharusan. Sehingga perempuan pengusaha harus benar-benar pandai dalam mengatur waktu agar peran yang mereka sandang dapat terpenuhi dengan baik. Imbasnya seringkali mereka harus menjadwal ulang meeting atau pertemuan dengan rekanan bisnis demi memenuhi kewajiban sebagai perempuan bali demi Ngayah adat, terlebih jika acara tersebut berlangsung di kampung halaman suami.

Melihat kondisi tersebut nampak bahwa pembagian peran menyangkut tugas-tugas domestik antara istri dan suami tidak ditemukan adanya pertukaran atau trade-off yang penuh pada pembagian peran domestik dari istri ke suami, meskipun pada beberapa keluarga telah terjadi trade-off atau pertukaran penuh dalam hal pencarian nafkah keluarga dari suami ke istri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam keluarga informan telah terjadi *sharing responsibility* ekonomi namun tidak untuk *sharing domestic works*, atau setidaknya hal tersebut belum terjadi secara penuh.

Pengelolaan keuangan dan kepemilikan aset-aset ekonomi merupakan indikator kedua untuk mengetahui dominasi ekonomi dalam keluarga yaitu pada pundak siapakah dominasi ekonomi tersebut dipikul. Pola pengelolaan keuangan keluarga sendiri tidak dapat dilepaskan dari pola pengelolaan keuangan usaha. Sehingga sebelum masuk ke pengelolaan keuangan rumah tangga terlebih dahulu akan dibahas mengenai pengelolaan keuangan usaha.

Dalam penelitian ini hampir setengah dari responden telah memisahkan pengelolaan keuangan keluarga dengan pengelolaan keuangan usaha. Selain karena tuntutan usaha yang sudah berbadan hukum sehingga dituntut pengelolaan dan pelaporan keuangan usaha yang dapat diaudit ternyata setengah responden tersebut berkomitmen untuk memisahkan kedua pengelolaan keuangan agar lebih mudah mengontrol perkembangan bisnisnya. Ada pula yang telah mempekerjakan karyawan khusus yang mengurus bagian akuntansi usaha. Sehingga secara otomatis suami istri sebagai pemilik usaha dan anak-anak mereka yang ikut bekerjapun mendapatkan gaji secara bulanan seperti halnya karyawan lain pada umumnya.

Bagi informan yang sudah memisahkan keuangan usaha dan keluarga mereka menganggap lebih mudah dalam mengelola keuangan. Disini penulis menemukan dua pola pengelolaan dan alokasi keuangan, yaitu sistem dua keranjang yaitu memisahkan antara gaji suami dan istri kerekening yang berbeda-beda atau sistem satu keranjang yang menggabungkan gaji yang mereka terima dalam satu rekening bersama. Jika dalam sistem dua keranjang suami istri telah bersepakat mengenai alokasi penggunaan masing-masing rekening. Misalnya saja pada responden ibu YS, sesuai kesepakatan dengan suami uang direkening istri dialokasikan untuk membiayai segala keperluan rumahtangga, misalnya saja untuk pembelian kebutuhan dapur dan kebutuhan ketika ada upacara-upacara keagamaan Hindu. Sedangkan uang direkening suami digunakan untuk membiayai

pendidikan kuliah anak dan membiayai kebutuhan menyama braya di kampung. Seperti pada petikan wawancara berikut ini.

"... Kalau uang saya ya dipakai buat beli kebutuhan dapur mbak, kalau sedang Rainan ya buat beli banten sama buah, itu juga sudah cukup kalau perlu tinggal gesek. Punya Ajik dulu ya khusus buat bayar sekolah anak, jadi dibiarin di Bank, kapan anak perlu biaya masuk (Sekolah) ya tinggal ambil. Tapi sekarang ya paling buat seneng-senang aja karena anak-anak sudah lulus semua. kemarin baru beli Gong satu set buat dikampung. Ya biarin aja uang dia yang pegang. Nanti kalau ada karya di kampung ya pake uang Ajiknya juga."

Dari pernyataan responden tersebut terlihat bahwa ada pemisahan yang jelas antara alokasi keuangan suami dan istri. Keuangan istri untuk membiayai pengeluaran domestik rumah tangga sedangkan suami untuk pembiayaan sekolah anak dan keperluan sosial lainnya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan pembagian alokasi keuangan sesuai dengan pos-pos atau sumber pembiayaan tersebut ternyata meminimalkan terjadinya percecokan antara suami istri dalam pemenuhan kebutuhan keluarganya atau dalam pengelolaan keuangan usaha. Sehingga tidak ada perdebatan yang sengit untuk menentukan kebutuhan mana yang akan didahulukan untuk dipenuhi dan berasal dari uang siapa.

Berbeda lagi dengan pengelolaan keuangan dua responden lain yang masih belum memisahkan secara tegas antara keuangan rumah tangga dengan keuangan usaha. Hal ini disebabkan karena cakupan usaha yang menurut responden masih kecil meskipun telah memiliki 10 orang karyawan. Dalam pengelolaan keuangan usaha seperti yang dituturkan oleh responden ibu SB masih dilakukan pencatatan sederhana, misalnya saja berapa modal yang dipakai untuk membeli bahan baku, berapa penjualan dalam satu hari hingga pencatatan gaji karyawan yang diberikan mingguan. Pengelolaan keuangan usaha dan keluarga yang masih gabung ini agak menyulitkan untuk melihat bagaimana dominasi ekonomi diantara suami dan istri. Namun dari cerita ibu SB terlihat bahwa kini semua keuangan sepenuhnya dipegang olehnya.

"... Dulu itu uang semua suami yang pegang mbak, saya dijatah buat belanja dapur. Dari bayar sekolah anak sampai untuk modal ya dia pegang. Awalnya masih jualan Chinese Food jadi kalau belanja ya dia sendiri. Berhenti jualan itu lalu suami borong kelapa, pisang, buah Cuma ya nggak lanjut. Akhirnya baru ketahuan kalau suami punya hutang ratusan juta di Bank, saya juga nggak tahu dipake buat apa karena dia nggak mau jujur. Dari sana saya tegas kalau semua keuangan saya yang ambil alih. Uang usaha saya yang pegang semuanya. Meskipun kalau mau beli apa-apa kaya rumah, pickup buat usaha ya dia masih mutusin mau yang kayak gimana."

Berkaca dari pengalaman sebelumnya kemudian SB mulai menata keuangan usaha. Dari hasil penjualan usaha dia mulai melakukan pencatatan sederhana terutama dialokasikan untuk gaji karyawan, menyisihkan untung untuk modal membeli bahan baku, mengalokasikan uang untuk membayar cicilan kredit di Bank hingga hanya mengambil seperlunya untuk kebutuhan dapur dan rumah tangga.

Meskipun dalam pengelolaan keuangan usaha atau keluarga berbeda-beda diantara para responden namun ada kesamaan ketika membahas mengenai kepemilikan aset-aset ekonomi baik aset usaha atau aset keluarga seperti rumah, mobil, motor atau tanah. Hampir seluruh aset yang dimiliki oleh responden dalam penelitian ini dicatatkan atas nama suami. Ada yang menganggapnya sebagai sebuah kewajaran karena suami adalah kepala keluarga terlebih dalam masyarakat Bali dimana posisi laki-laki (suami) lebih utama dibanding perempuan (istri). Adapula responden (istri) yang enggan untuk mencantumkan namanya pada kepemilikan aset karena malas untuk berurusan dengan tetek bengek urusan legal formal. Misal pada responden ibu KK seperti petikan wawancara berikut ini:

“ Saya paling males mbak urusan sama kantor, kayak ngurus SIUP ngurus ijin ini itu, urusan sama Bank ya biar suami saja yang ngurus. Saya lebih seneng ngurus barang dipabrik apa digudang, ketemu sama pembeli jadi ya udah itu bagian suami saja.”

Begitu juga pada responden YS, merasa suaminya lebih mumpuni dalam bidang hukum daripada dirinya ia menyerahkan segala hal yang berhubungan dengan surat-surat dan legal formal lain sebagainya kepada suami. Hanya pada hal pemasaran saja istri merasa lebih luwes untuk bertemu dengan rekanan atau mitra bisnis sehingga dialah yang akan mengambil alih bagian pemasarannya.

Topik pengambilan keputusan sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari topik pembagian peran atau pengelolaan keuangan dan kepemilikan aset ekonomi, namun ada beberapa hal yang patut mendapat perhatian berhubungan dengan pengambilan keputusan. Dari hasil temuan di lapangan ditemukan bahwa dalam pengambilan keputusan masih mutlak menjadi dominasi suami, baik menyangkut kehidupan keluarga atau operasional perusahaan.

Pada responden YS, diawal pernikahan suami dan istri ini belum memulai usaha mereka. Istri masih bekerja sebagai direktur sebuah rumah sakit sedangkan suami bekerja sebagai manajer pemasaran disebuah perusahaan obat. Suatu ketika suami dipindah tugaskan ke luar pulau, suami mengingatkan komitmen awal pernikahan bahwa keluarga harus selalu bersama sehingga istri pun rela mengundurkan diri dari tempat kerja dan ikut pindah bersama suami dan anak-anaknya hingga menjadi ibu rumah tangga. Bahkan ketika akhirnya mereka harus kembali lagi ke Bali karena suami di PHK saat terjadi krisis moneterpun istri tetap setia mendampingi suami. Menurutnya ini merupakan resiko menikah baik buruk harus tetap bersama.

Pengambilan keputusan penting lainnya diambil oleh suami responden ibu KK yaitu saat memutuskan untuk keluar dari banjar adat dikampung halaman suami dan memilih untuk me-Banjar dinas ditempat mereka sekarang tinggal. Hal tersebut diputuskan karena suami mengingat kesibukan istri mengurus usaha. Seperti petikan wawancara dengan KS berikut:

“... Awalnya dulu ya mebanjar adat di Tabanan, karena bapak asli Tabanan tiap kali ada karya atau ngayah ya pulang kampung. Tapi lama-lama kok berat, belum lagi saya harus kirim endek sama kebaya ke toko di Klungkung atau Negara, ya habis waktunya. Kalau bayar denda karena gak bisa Ngayah ya nggak berat cuma ya perasaan nggak enak sama Nyama disana sodara dikampung, bapak akhirnya mutusin buat mebanjar dinas saja di Denpasar.”

Keputusan lain yang menunjukkan dominasi suami dialami oleh ibu SB, menurutnya anak pertamanya sebenarnya tidak berminat untuk melanjutkan pendidikan pelayaran seperti kemauan suami, namun karena tidak berani menentang perintah Ayahnya akhirnya sang anak pun menyanggupi untuk kuliah di pelayaran. Mengingat suami ibu SB dulunya memang bercita-cita bekerja di kapal pesiar dan tidak tercapai ada kemungkinan hal tersebut akhirnya dipaksakan pada anak pertamanya.

Dominasi suami dalam pengambilan keputusanpun juga nampak pada pengelolaan usaha. Baik ketika memutuskan untuk memperluas pabrik, menambah karyawan bahkan ketika memutuskan untuk melakukan MOU dengan rekanan bisnis atau saat memutuskan untuk mengambil pinjaman untuk modal usaha.

4. Simpulan

Dari hasil dan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun suami dan istri sama-sama terlibat dalam pengurusan bisnis keluarga nyatanya pihak istri yang masih menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga dan detail operasional bisnis sehari-hari. Meski demikian perempuan pengusaha belum memegang kendali dalam pengambilan keputusan bahkan dapat dikatakan suami yang berperan besar dalam pengambilan keputusan keluarga ataupun usaha. Begitupula pada pengelolaan dan kepemilikan aset keluarga. Dari tiga indikator tersebutlah dapat diambil kesimpulan bahwa distribusi kekuasaan dalam keluarga pun masih didominasi oleh pihak suami. Dari temuan tersebut jelas bahwa perempuan entrepreneur memiliki tugas dan tantangan yang lebih besar daripada ketika mereka hanya menjadi ibu rumah tangga, sebab selain harus mencari nafkah ia juga tidak dapat melepaskan diri dari "kodrat"-nya yang melekat kuat di dalam masyarakat patrilineal dalam mengurus segala urusan rumah tangga.

Pustaka Acuan

- Blanche, M. T., Durrheim, K. & Painter, D. (2006). *Research in practice: Applied methods for social sciences* (2nd ed.). Cape Town: University of Cape Town Press.
- Bourdieu, P. (1977). *Outline of a theory of practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- BPS Provinsi Bali. (2016). *Provinsi Bali Dalam Angka*. Bali: CV. Bhineka.
- Bradley, F. & Boles, K. (2000). *Female Entrepreneur from Ethnic Background: An Exploration of Motivations and Barriers*, *Manchester Metropolitan University Business School Working Paper Series*, wap03/09.
- Bryman, A. (2004). *Social research methods* (2nd ed.). New York: Oxford University Press.
- Budiman, A. (1985). *Pembagian Kerja Secara Seksual*. Jakarta: Gramedia.
- Bungin, B. (2007). *Analisis data penelitian kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Crotty, M. (1998). *The foundations of social research: Meaning and perspective in the research process*. London: Sage Publications.
- Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (2005). Introduction: The discipline and practice of qualitative research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *The Sage Handbook of Qualitative Research*, (3rd ed., pp. 1-32). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Easterby-Smith, M., Thorpe, R. & Lowe, A. (2002). *Management research: An introduction*. London: Sage Publications.

- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. New York: Basic Books.
- Geertz, H. (1983). *Keluarga Jawa*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Guba, E. G. & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *Handbook of Qualitative Research*, (pp. 105-117). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Hammersley, M. (1992). *What's wrong with ethnography? Methodological explorations*. London: Routledge.
- Hussey, J. & Hussey, R. (1997). *Business research: A practical guide for undergraduates and postgraduate students*. New York: Macmillan Press.
- Jick, T. D. (1979). Mixing qualitative and quantitative methods: Triangulation in action. *Administrative Science Quarterly*, 24(4), 602-611.
- Lauk, M. & Meyer, S. (2004). Women, Men and Housework Time Allocation: Theory and Empirical Result. *Darmstadt Discussion Papers in Economics*, Nr 143.
- Lee, A. S. (1989). A scientific methodology for MIS case studies. *MIS Quarterly*, 13(1), 33-50.
- Leedy, P. D. (1985). *Practical research, planning, and design*. London: Macmillan Press.
- Lincoln, Y. S. & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. London: Sage Publications.
- Mansour, F. (1996). *Analisis Gender dan Transformasi sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Matza, D. (1969). *Becoming deviant*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Muhadjir. (2005). *Negara dan Perempuan.*, Yogyakarta: CV. Adipura. Retrieved 12 February 2010 from http://anthro.palomar.edu/change/change_2.htm.
- Murniati, A. & Nunuk P. (2004). *Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi dan HAM*. Magelang: Indonesia Tera.
- _____ (2004). *Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam perspektif Agama, Budaya dan Keluarga*. Magelang: Indonesia Tera.
- Pandit, B. (2003). *Pemikiran Hindu*. Surabaya : Paramita.
- Pemerintah Provinsi Bali. (2006). *Profil Daerah Bali*, <http://www.baliprov.go.id/informasi/profil/>, 13/06/2017.
- Sajogyo, P. (1983). *Peranan Wanita Dalam Perkembangan Masyarakat Desa*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Schwandt, T. A. (1994). Constructivist, interpretivist approaches to human inquiry. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *Handbook of Qualitative Research*, (pp. 118-137). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Stake, E. R. (1995). *The art of case study research*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Tim Ekspor. (2008, Maret). *CSR untuk Pemberdayaan Perempuan UKM*. Dilihat tanggal 13/06/2017, dari http://www.bexi.co.id/images/_res/AnalisaPeristiwa-39-CSR%20Untuk%20Pemberdayaan%20Perempuan%20UKM.pdf.
- Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology* (G. Roth & C. Wittich, Eds.). Berkeley: University of California Press.
- Wenning, J. C. (2002). A multiple case study of novice and expert problem solving in kinematics with implications for physics teacher preparation. *Journal of Physics Teacher Education Online*, 1(3), 7-14.
- Wolf, D. L. (1992). *Factory Daughters: Gender, Household Dynamics, and Rural Industrialization in Java*. UK: University of California.
- Yin, R. K. (2003). *Case study research: Design and methods* (3rd ed.). London: Sage Publications.

